

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA SATU RUMAH SATU SARJANA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PONGGOK KABUPATEN KLATEN

POLICY IMPLEMENTATION OF SATU RUMAH SATU SARJANA SCHOLARSHIP PROGRAM IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN PONGGOK VILLAGE, KLATEN REGENCY

Oleh: Ulyatun Tasyak, Universitas Negeri Yogyakarta
ulyatuntasyak.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi serta faktor pendukung dan penghambat program beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana (SRSJ) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dipilih melalui purposive sebanyak 12 orang. Data dianalisis menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori ahli Van Horn dan Van Meter. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi Satu Rumah Satu Sarjana mahasiswa di perguruan tinggi didukung sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang mencukupi. Komunikasi dan hubungan antar organisasi pelaksana dilakukan berdasarkan standar yang berlaku. Pada aspek disposisi, pemerintah desa kurang melaksanakan kegiatan pengawasan karena tidak adanya sistem pengawasan yang terstruktur. Adapun faktor pendukung implementasi beasiswa SRSJ, yaitu empati pemerintah yang tinggi dan sumber daya desa yang mencukupi. Sedangkan faktor penghambat, yakni administrasi pemerintah desa yang buruk, lingkungan kerja yang tidak kondusif, kelompok sasaran (mahasiswa) yang tidak mengikuti aturan, dan munculnya pandemi Covid-19.

Kata kunci: implementasi, beasiswa pendidikan, Satu Rumah Satu Sarjana

Abstract

This study aims to describe the implementation as well as the supporting and inhibiting factors of the One Home One Scholar (OHOS) scholarship program in community empowerment in Ponggok Village, Klaten Regency. This study uses a descriptive type with a qualitative approach. The research subjects were selected purposively as many as 12 people. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive technique. Test the validity of the data by triangulation of sources and techniques. The results of the study were analyzed using the expert theory of Van Horn and Van Meter. The results show that the implementation of One Home One Scholar students in higher education is supported by adequate human resources and financial resources. Communication and relations between implementing organizations are carried out based on applicable standards. In the disposition aspect, the village government does not carry out supervisory activities because there is no structured supervision system. The supporting factors for implementing the OHOS scholarship are high government empathy and sufficient village resources. While the inhibiting factors are poor village government administration, a non-conducive work environment, target groups (students) who do not follow the rules, and the emergence of the Covid-19 pandemic.

Keywords: implementation, educational scholarships, One Home One Scholar

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pemegang dan pendukung yang penting dalam

menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara serta aspek kehidupan manusia seluruhnya. Fungsi ini tercantum pada

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 2 pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi yang dapat mengembangkan kemampuan dan watak seluruh peserta didik dan mengembangkan potensinya.

Pendidikan dirancang menjadi ideal untuk membentuk peserta didik yang berkarakter melalui pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara (dalam Marzuki dan Siti Khanifah, 2016: 174-178) menjelaskan bentuk pendidikan karakter sebagai pendidikan yang ideal dengan mengimplementasikan dasar pembangunan jiwa atau yang disebut “Dasar Jiwa”. Potensi biologis yang dibawa oleh manusia yang tidak dapat dirubah, namun dapat dikendalikan ini diarahkan pada proses bagaimana ia dapat “mengendalikan diri”, sehingga dapat dihasilkan pendidikan karakter yang membawa dasar pengajaran budi pekerti atau adab.

Upaya implementasi yang sesuai dengan amanat Undang-undang pendidikan nasional tersebut, faktanya masih ditemui ketidaksesuaian dengan munculnya permasalahan pendidikan. Salah satunya adalah permasalahan mengenai peningkatan angka putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan dibalikinya, yaitu faktor ekonomi keluarga yang tidak cukup untuk membayar biaya pendidikan di

tingkat lanjut dan pandangan untuk langsung bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Berdasarkan survey Bps.go.id tahun 2018-2020 mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi menurut Provinsi dengan pengukuran pada tingkat minat masyarakat di Indonesia untuk melanjutkan ke Perguruan masih mencapai angka 31% saja dibandingkan negara lainnya.

Angka partisipasi yang rendah tersebut menjadikan pemerintah pusat merancang solusi agar partisipasi dan minat melanjutkan ke perguruan tinggi dapat meningkat, yaitu melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dengan beasiswa pendidikan secara gratis kepada mahasiswa. Hal tersebut didasarkan pada amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab V pasal 12 (1.c) mengenai pemberian beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi namun orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan pasal 12 (1.d) tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi Pasal 76 Ayat 2 yang menjelaskan pemenuhan hak mahasiswa, dimana pemerintah harus memberikan (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan,

dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi saat lulus atau setelah memperoleh pekerjaan.

Tingkat partisipasi pendidikan tinggi oleh Provinsi Jawa Tengah sendiri, berdasarkan data survey melalui Bps.go.id tahun 2020 yang menyebutkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tahun 2018-2020 di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan angka partisipasi kasar terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa, yaitu 22%-23% saja.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi tersebut ditunjukkan oleh pendapat staf khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi dan Pendidikan, Mohammad Nasir, bahwa angka partisipasi kasar dalam minat melanjutkan pendidikan tinggi adalah dikarenakan kendala terhadap biaya pendidikan dan juga alasan untuk lebih memilih langsung bekerja. (nasional.kontan.co.id)

Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah menilik atas kasus rendahnya minat dan partisipasi pendidikan tinggi tersebut memberikan upaya peningkatan melalui penerapan kebijakan desentralisasi sebagai pembangunan mandiri daerahnya dengan ditetapkannya kebijakan pemberian beasiswa. Melalui Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 tahun

2019 bab 4 tentang Bantuan Sosial pasal 13 ayat 2 yang menyatakan bahwa bantuan sosial pada lingkup pendidikan berupa beasiswa bagi anak miskin dengan pemberian uang secara langsung kepada penerima. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten sendiri melaksanakan program pemberian beasiswa pendidikan melalui Beasiswa Aqua. Beasiswa tersebut bekerjasama dengan PT. Tirta Investama Klaten (Aqua Klaten) dengan Pemda Klaten memberikan beasiswa kepada 147 siswa di tingkat SD hingga SMA se-kecamatan Polanharjo (jatengprov.go.id).

Lingkup pemerintahan desa sebagai pemerintahan mikro dan terdekat dengan masyarakat juga dilaksanakan kebijakan desentralisasi melalui implementasi Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bab 3 pasal 17 ayat 2.a tentang klasifikasi belanja desa atas pelaksanaan pembangunan desa adalah pada bidang pendidikan. Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan desentralisasi tersebut membuat kebijakan hingga program yang berkaitan dengan penggunaan dana desanya pada bidang pemberdayaan pendidikan, salah satunya program beasiswa pendidikan oleh desa.

Berdasarkan informasi awal, Pemerintah Desa Ponggok Kabupaten Klaten membuat program beasiswa pendidikan. Implementasi program

beasiswa pendidikan yang bertujuan mengajak masyarakat desanya untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan tinggi dan upaya memberdayakan masyarakatnya ini disebut program “Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana”. Program ini menarget masyarakat asli desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi agar menghasilkan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi untuk kembali memberdayakan desa. Harapan lainnya adalah, lulusan SMA/SMK se-derajat tidak langsung memilih bekerja ke PT. Aqua yang beroperasi di Desa Ponggok yang sebelumnya tercatat banyak yang terserap ke perusahaan tersebut dan meninggalkan pemberdayaan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ponggok Kabupaten Klaten.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Desa Ponggok Kabupaten Klaten. Kantor tersebut beralamat di Jln. Delanggu-Polanharjo, Desa Jeblogan, Kecamatan

Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sekitar 25 menit dari pusat kota Klaten. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Juli-31 September 2021 dan pada tanggal 9-28 Februari 2022. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang dikarenakan kondisi Covid-19 yang meningkat dan dampak infeksi virus yang mengenai narasumber-narasumber dan lokasi penelitian.

Target/Subjek Penelitian

Penelitian ini memiliki subjek penelitian, diantaranya Kepala Desa Ponggok, Sekretaris Desa Ponggok, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Tata Usaha Kantor Desa Ponggok, Kepala BUMDes Tirta Mandiri dan Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri, Kepala BPD (Badan Perwakilan Desa) Ponggok, Direktur PT. Sumber Panguripan dan Ketua Karangtaruna, serta mahasiswa penerima Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dari desa. Pemilihan subjek penelitian ini berdasarkan hasil dari teknik *purposive sampling* atas keinginan dan pengetahuan peneliti atas narasumber yang akan dituju. Objek penelitiannya adalah implementasi program beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok Kabupaten Klaten.

Prosedur

Prosedur dalam penelitian ini diantaranya melalui tiga kegiatan. Kegiatan

wawancara untuk memperoleh informasi terkait implementasi program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok Kabupaten Klaten. Kegiatan observasi melalui jenis non partisipan yang berarti peneliti tidak langsung terlibat dalam implementasi program. Kajian terhadap dokumen-dokumen juga dilakukan sebagai penguat dan pendukung data yang diperoleh saat proses penelitian. Dokumen pendukung tersebut diantaranya berupa foto, Standar Operasional Prosedur (SOP), data nama penerima program, dan data lain, seperti data realisasi program dan lainnya yang tersedia di Kantor Desa Ponggok Kabupaten Klaten.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif didapatkan melalui proses wawancara mendalam yang didasarkan pada teori implementasi Van Horn dan Van Meter. Adapun teori Van Horn dan Van Meter (dalam Wahab, 2012: 135) didasarkan melalui enam indikator dasar, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, kondisi lingkungan, dan disposisi implementor.

Pengkajian dokumen juga dilakukan dalam penelitian ini terhadap data-data pendukung. Dokumen tersebut diantaranya berupa profil struktur organisasi pegawai Kantor Desa Ponggok

Kabupaten Klaten, Visi dan Misi Desa Ponggok, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana, data mahasiswa penerima program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana tahun 2017-2020, data realisasi atau pencairan dana tahun 2017-2020, foto kegiatan pertemuan antara Pemerintah Desa Ponggok dengan mahasiswa penerima program, dan sarana informasi dan komunikasi melalui grup *WhatsApp*.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga mencapai data yang jenuh (Miles dan Huberman, dalam Sugiyono, 2020: 134). Tahapan-tahapan dalam model analisis ini menunjukkan empat tahap, diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ponggok Kabupaten Klaten

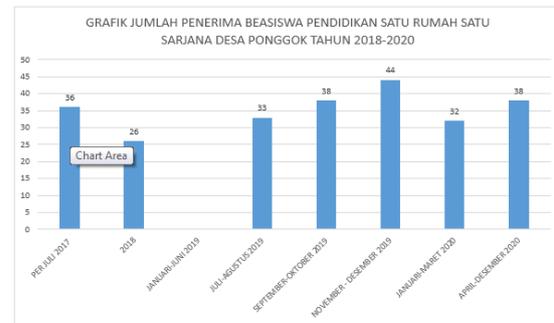
Hasil penelitian menggunakan teori ahli Van Horn dan Van Meter (dalam Wahab, 2012: 135) untuk melihat bagaimana analisis implementasi program

Satu Rumah Satu Sarjana dalam pemberdayaan masyarakat melalui enam aspek. Aspek tersebut yaitu standar dan sasaran, sumber daya, kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana, dan disposisi implementor. Adapun hasil analisis tersebut ditunjukkan melalui hasil data sebagai berikut.

Pertama, standar dan sasaran program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana. Standar program ini adalah mengacu pada RPJMDes atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa yang direalisasikan melalui kebijakan pemberdayaan desa yang diimplementasikan melalui program beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana. Program berjalan dengan acuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku tertanggal 09 November 2019. Peraturan syarat dan berkas yang harus dipenuhi meliputi (a) Pemuda dari Desa Ponggok, (b) IP per semester minimal 2,0, (c) masa studi maksimal 5 tahun; memiliki prestasi dan IPK >3,5 (mendapat besaran uang sebesar Rp500.000), (d) turut aktif dalam kegiatan karangtaruna, (f) melakukan pengabdian di desa dengan membuat kajian-kajian dan analisa perkembangan desa di setiap akhir tahun, (g) tambahan lainnya, seperti bukti Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan menyetor rekening bank BNI.

Sasaran program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana adalah masyarakat

terutama pemuda Desa Ponggok yang melanjutkan pendidikan tinggi. Berikut grafik rekap data penerima program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana tahun 2018-2020.



Gambar.1 Rekap Data Penerima Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana Tahun 2018-2020

Kedua, komponen penting yang harus dipenuhi dalam implementasi yang efektif melalui sumber daya (Edward III, dalam Subarsono, 2015: 90). Sumber daya dalam implelementasi program ini terbagi menjadi tiga aspek. Sumber daya manusia dalam implementasi Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok Kabupaten Klaten adalah Kepala Desa Ponggok sebagai penanggungjawab, Sekretaris dan Kepala Urusan Tata Usaha sebagai pengelola administrasi, Kepala Urusan Keuangan sebagai pengelola dan realisasi dana program yang mengirimkan uang saku kepada mahasiswa, dan 5 orang pegawai Kantor Desa Ponggok sebagai penerima ajuan berkas program dan mengajak

masyarakat turut ikut serta. Selain itu, Kepala BUMDes Tirta Mandiri Desa Pongkok dan Sekretaris BUMDes sebagai pihak yang berwenang dalam realisasi program berupa PADes (Pendapatan Asli Desa) yang diajukan Pemerintah Desa melalui APBDes. Kemudian Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga yang menyetujui pelaksanaan program dari Pemerintah Desa Pongkok.

Sumber daya finansial dalam implementasi Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana adalah dana desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Pongkok kepada BUMDes Tirta Mandiri sebagai lembaga pengelola aset dan keuntungan desa. Realisasi anggaran tersebut berupa uang pendukung pelaksanaan program senilai kurang lebih Rp200.000.000 setiap tahunnya. Berikut grafik dana pengeluaran program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana tahun 2017-2020.



Gambar.2 Rekap Data Dana Pengeluaran Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana Tahun 2017-2020.

Realisasi anggaran program beasiswa kepada tiap mahasiswa diberikan sesuai dengan perolehan IP setiap semester

dengan pengumpulan nilai akumulatif IP semester atau Daftar Hasil Siswa (DHS), dimana IP di atas 3,5 mendapatkan uang sebesar Rp500.000 per bulan dan yang mendapat IP di bawah 3,5 akan mendapat uang Rp300.000 per bulan.

Sumber daya fasilitas yang dimiliki Pemerintah Desa Pongkok terhadap program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana ini adalah Grup *WhatsApp* sebagai wadah komunikasi dan pembagian informasi antar pemerintah dan mahasiswa. Kegiatan seminar atau *talkshow* sebagai fasilitas tambahan yang diberikan Pemerintah Desa Pongkok secara gratis untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa.

Ketiga, hubungan antar organisasi pelaksana yang ditunjang berdasarkan komunikasi yang berhasil menghasilkan implemementasi kebijakan yang sesuai (Edward III, dalam Subarsono, 2015: 90). Implementasi program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam keadaan komunikasi telah terjalin baik. Pola koordinasi antar organisasi menunjukkan kesesuaian atas rencana-rencana program yang disepakati bersama, seperti dalam pelaksanaan realisasi anggaran program oleh BUMDes Tirta Mandiri. Hubungan yang terjalin baik juga antara Pemerintah Desa Pongkok dengan BPDes yang menyepakati pelaksanaan program beasiswa ini sesuai dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan

peningkatan partisipasi pemuda dalam pendidikan tinggi.

Keempat, kondisi lingkungan yang mencakup 1) tingkat kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor pelaksana, 2) karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, dan 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (Grindle, dalam Subarsono, 2015: 93). Kondisi lingkungan dalam iklim aktor pelaksana program di Kantor Desa Ponggok yang masih dinilai belum kondusif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya karakteristik kepemimpinan yang berbeda antara Kepala Desa Ponggok dengan Sekretaris Desa Ponggok. Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi mengakibatkan penutupan tempat-tempat wisata desa dan menurunnya pemasukan desa, sehingga sumber dana program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana menjadi terdampak. Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana pada tahun 2020 diputuskan berhenti sementara hingga waktu yang belum ditentukan, serta anggaran program ini dialokasikan ke program desa lainnya, seperti penanganan ekonomi dan kesehatan masyarakat yang terdampak. Namun, keputusan tersebut tidak sejalan dengan pola kepemimpinan Sekretaris Desa yang dianggap melanggar tata hukum administrasi program beasiswa ini. Selain itu, ditemukan kasus pemalsuan tanda tangan surat persetujuan realisasi

anggaran program yang seharusnya ditandatangani oleh Sekretaris Desa Ponggok, tetapi dilakukan oleh salah satu pegawai yang dipercaya oleh pegawai-pegawai lainnya. Kemudian pada responsivitas kelompok sasaran, yaitu mahasiswa, ditemukan ketidakpatuhan terhadap aturan pengumpulan pemberkasan nilai IP per semester dan kajian penelitian di Desa Ponggok setiap tahun yang disetor kepada pemerintah desa. Berkas-berkas tersebut tidak rutin diserahkan dan mengakibatkan pencairan tetap berjalan walaupun mahasiswa terkait telah lulus studi.

Kelima, karakteristik pelaksana menurut Van Horn dan Van Meter (dalam Wahab, 2012: 135) meliputi struktur organisasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi. Implementasi program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana terdiri dari pelaksana yang merupakan pegawai-pegawai Kantor Desa Ponggok. Berdasarkan hasil penelitian, karakter yang dimiliki adalah karakter yang bertanggungjawab dalam mengupayakan kinerja program menjadi yang terbaik. Namun dikarenakan kondisi lingkungan Pemerintah Desa yang kurang kondusif mengakibatkan adanya pola hubungan yang tidak sesuai dengan norma mengenai pelaksanaan program. Seperti adanya ketidaksamaan penerimaan keputusan pemberhentian program akibat Pandemi

Covid-19 sehingga menghasilkan pelanggaran norma terhadap pemalsuan tanda tangan pimpinan untuk pengajuan realisasi anggaran program.

Keenam, aspek disposisi implementor menurut Edward III (dalam Subarsono, 2015: 90) meliputi watak yang dimiliki implementor, diantaranya berupa komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Implementor program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana telah memiliki komitmen yang tinggi dalam mengupayakan sumber daya manusia berpendidikan tinggi dalam pembangunan desa. Namun kemampuan pelaksana melalui kegiatan pengawasan implementasi

program beasiswa ini masih belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementor jarang melaksanakan evaluasi program secara terbuka bersama dengan mahasiswa, sehingga muncul ketidaksesuaian dan permasalahan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan aspek-aspek yang dipaparkan, dapat tergambar mengenai implementasi program diantaranya, terwujudnya upaya pemberdayaan masyarakat yang bermakna dan terstruktur. Secara lebih detail, berdasarkan hasil penelitian implementasi program tersebut dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 1. Implementasi Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam Pemberdayaan Masyarakat

No	Aspek	Hasil
1.	Standar Sasaran	Acuan melalui RPJMDes (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa) dalam rencana kebijakan pemberdayaan masyarakat. Direalisasikan melalui SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ponggok. Mahasiswa asli dari Desa Ponggok Kabupaten Klaten yang sedang menempuh pendidikan tinggi di seluruh universitas di Indonesia, baik jenjang diploma, sarjana, hingga magister.
2.	Sumber Daya	1. Sumber daya manusia diperoleh dari komponen Pemerintah Desa Ponggok, BUMDes, dan BPDes. 2. Sumber daya finansial berupa dana desa yang direalisasikan berupa PADes yang diajukan kepada BUMDes dan pendapatan royalti dari Aqua (berhenti sejak tahun 2020). Realisasi kepada mahasiswa setiap bulan yang didasarkan dari besar IP yang didapatkan. 3. Sumber daya fasilitas berupa wadah komunikasi melalui <i>WhatsApp Group</i> . Fasilitas lainnya berupa kegiatan <i>talkshow</i> bersama Kepala Desa Ponggok.
3.	Hubungan Antar Organisasi	Komunikasi dan koordinasi berjalan baik dan sesuai prosedur antara Pemerintah Desa Ponggok dan BUMDes dalam hal realisasi sumber dana program. Kemudian dengan BPDes berupa kesepakatan terhadap kebijakan dan perencanaan program.
4.	Kondisi Lingkungan	Pola hubungan kepemimpinan dalam pelaksanaan program dinilai tidak kompak dan kondusif. Serta, responsivitas mahasiswa yang rendah dan tidak taat aturan,.
5.	Karakteristik Pelaksana	Bertanggungjawab dan mengupayakan kinerja program yang terbaik. Namun, diakibatkan kondisi lingkungan lembaga yang tidak kondusif menyebabkan pelanggaran norma terhadap administrasi program dan keputusan pemberhentian program.
6.	Disposisi Implementor	Komitmen yang tinggi dalam mengupayakan program demi dihasilkan sumber daya masyarakat yang berdaya. Namun, dalam segi pengawasan dan evaluasi program dinilai belum konsisten dan optimal.

Faktor pendukung dan Penghambat Implementasi Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ponggok Kabupaten Klaten

Siagian (dalam Hasbullah, 2016: 93) menjelaskan bahwa terdapat lima aspek yang digunakan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambur dalam implementasi kebijakan, diantaranya a) manusia, 2) struktur organisasi, 3) proses administrasi dan manajemen, 4) sumber dana, dan 5) sumber daya. Analisis teori tersebut menghasilkan analisis faktor pendukung implementasi program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok sebagai berikut.

Pertama, kepedulian Pemerintah Desa Ponggok terhadap pendidikan tinggi cukup baik. Pemerintah desa yang merupakan pelaksana program memiliki kepedulian yang berorientasi pada pencapaian tujuan bersama terhadap isu peningkatan minat dalam pendidikan tinggi pemuda desanya. Tujuan dalam upaya membentuk sumber daya manusia melalui pemuda yang berkualitas ini sebagai proses memberdayakan masyarakat desanya dan menyiapkan sumber daya manusia untuk pengembangan desanya.

Kedua, sumber daya finansial yang dimiliki Desa Ponggok melimpah. Keuntungan yang didapatkan dari

pengelolaan wisata-wisata umbul dan lainnya memberikan pemasukan dana terhadap Desa Ponggok dalam jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Pemasukan tersebut dikelola oleh BUMDes Tirta Mandiri dan direalisasikan kepada Pemerintah Desa Ponggok menjadi sumber daya finansial program-program desa. Salah satunya adalah program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana yang ditunjang sejak dibuat pada tahun 2016 ini, namun program ini juga ditunjang oleh royalti kerjasama PT. Aqua yang masuk pada dana desa. Kontribusi royalti tersebut pada program beasiswa tercatat telah menunjang sumber daya finansial sejak program dibuat hingga tahun 2020, kemudian sumber daya finansial program sejak tahun 2020 ditunjang langsung dari realisasi BUMDes saja.

Sedangkan analisis mengenai faktor penghambat program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana sebagai berikut. Pertama, pengelolaan administrasi program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana yang tidak teratur. Surat Keputusan ataupun dasar peraturan kebijakan tidak ditemukan bukti fisik dikarenakan kegiatan pengarsipan data-data program tidak berlangsung secara rutin.

Kedua, lingkungan kerja Kantor Desa Ponggok yang tidak kondusif. Adanya kepemimpinan yang bercabang dan berlainan antara Kepala Desa dan

Sekretaris Desa terhadap keputusan pemberhentian program beasiswa ini saat munculnya Pandemi Covid-19. Keputusan untuk mengalihkan anggaran program beasiswa sebagai cadangan program pemulihan masyarakat terdampak Covid-19 ditentang oleh Sekretaris Desa dan dianggap menyimpang dari ketentuan hukum. Persuratan mengenai persetujuan dan tidaknya realisasi pengantar anggaran program juga tidak ditandatangani oleh Sekretaris Desa, namun dipalsukan oleh salah satu pegawai desa lain. Kondisi tersebut menimbulkan tidak konsistennya pengawasan program dan menimbulkan permasalahan lainnya.

Permasalahan lainnya menjadi faktor ketiga dari faktor penghambat implementasi program ini, dimana mahasiswa penerima program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana tidak menunjukkan sifat suportif terhadap pemenuhan pemberkasan. Pemberkasan yang seharusnya dikirimkan kepada Pemerintah Desa berupa nilai akumulatif IP semester dan hasil penelitian di Desa Ponggok setiap satu tahunnya tidak dilaksanakan secara teratur. Tindakan tegas dari Pemerintah Desa Ponggok terhadap mahasiswa tersebut tidak pernah dilaksanakan, berikut dengan kegiatan evaluasi bersama.

Faktor keempat yang menghambat implementasi program adalah mengenai

munculnya Pandemi Covid-19 yang menimbulkan keputusan pemberhentian program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana. Program yang diberhentikan sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Desember 2021 menimbulkan respon dari mahasiswa yang menagih hak mereka. Kondisi tersebut direspon oleh Pemerintah Desa Ponggok tertanggal 31 Desember 2021 dengan dibuat forum komunikasi bersama. Kegiatan tersebut menghasilkan perealisasi dana progra yang terhambat kepada semua mahasiswa, namun tanpa melihat besaran IP semester tiap mahasiswa, dimana seharusnya mahasiswa mendapatkan realisasi dana yang berbeda, namun mereka mendapatkan besaran yang sama.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok Kabupaten Klaten sudah cukup efektif. Komunikasi antar pelaksana berjalan dengan lancar dan sesuai dengan pembagian *jobdesk* yang diberikan. Namun, iklim kerja dalam Kantor Desa Ponggok masih dinilai tidak kondusif. Sehingga menyebabkan karakteristik para pelaksana program

berlawanan dan kurang berkomitmen dalam pengawasan dan pelaksanaan program secara jangka panjang.

2. Faktor pendukung implementasi program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana, yaitu 1) kepedulian Pemerintah Desa Ponggok dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang tinggi dan berkelanjutan. 2) sumber daya finansial desa memiliki capaian yang melimpah dan mendukung implementasi program sejak dibuat hingga saat ini.
3. Faktor penghambat implementasi berupa, 1) pengelolaan administrasi yang kurang teratur, sehingga menyebabkan beberapa berkas data-data administrasi program tidak dapat diakses; 2) lingkungan kerja di Kantor Desa Ponggok sebagai lingkungan pelaksana program kurang kondusif; 3) kelompok sasaran yaitu mahasiswa tidak suportif dalam memenuhi pemberkasan program; dan 4) berupa adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan sistem dan kondisi pelaksanaan program.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, saran yang diberikan yaitu: (1) Pemerintah Desa Ponggok hendaknya membuat strukturisasi program yang teratur dan diawasi Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Kantor Desa

Ponggok, terdiri dari ketua penanggungjawab, sekretaris program, hubungan masyarakat dan layanan informasi dan pengaduan. (2) pelaksanaan evaluasi program oleh petugas program yang telah dibuat bersama dengan birokrasi pemerintahan desa. (3) pemberkasan data program dikelola oleh penanggungjawab utama yakni Kepala Urusan Tata Usaha yang kemudian ikut dievaluasi secara berkesinambungan bersama dengan Sekretaris Desa melalui komputerisasi ataupun secara manual.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2020. *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi 2018-2020*. Bps.go.id <https://www.bps.go.id/indicator/28/1443/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html> (Diakses pada tanggal 08 Juni 2021 pukul 18.23)
- Hasbullah, H.M. 2016. *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Marzuki dan Siti Khanifah. 2016. *Pendidikan Ideal Perspektif Tagore dan Ki Hajar Dewantara dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik*. Jurnal Civics. Vol.13(2). Hal 174-178. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/17.%20Pendidikan%20Ideal%20Perspektif%20Tagore%20dan%20Ki%20Hajar%20Dewantara%20dalam%20Pembentukan%20Karakter%20Peserta%20Didik.pdf> (Diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 21.17)

- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab V pasal 12 (1.c) dan (1.d)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi Pasal 76 Ayat 2
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 tahun 2019 bab 4 tentang Bantuan Sosial pasal 13 ayat 2
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bab 3 pasal 17 ayat 2.a
- Waseso, Ratih. 2020. *Jumlah Siswa Yang Lanjut Perguruan Tinggi Di Indonesia Tertinggal Jauh Dari Tetangga*. Nasional.kontan.co.id <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-siswa-yang-lanjut-perguruan-tinggi-di-indonesia-tertinggal-jauh-dari-tetangga> (Diakses pada tanggal 08 Juni 2021 pukul 18.23)
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan, Model-model Implementasi, Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara: Jakarta <https://id.id1lib.org/book/17747264/8667e9> (Diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 11.40)
- Yandi, dev. 2021. Aqua Klaten Beri Beasiswa untuk 147 Siswa Berprestasi. jatengprov.go.id <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/aqua-klaten-beri-beasiswa-untuk-147-siswa-berprestasi/> (Diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.25)